



RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG
TAHUN 2020

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG
2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 ini disusun dalam rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, mudah-mudahan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2020 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, 2019

**KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG**



Ir. H. ARIF PRASETYA S, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600825 199011 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 6 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN LALU | 10 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung | 10 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung | 16 |
| 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung | 18 |
| 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 21 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat | 31 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG 2020 | 35 |
| 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 | 35 |
| 3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2020 | 38 |
| 3.3 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 | 38 |

| | | |
|---------------|---|----|
| BAB IV | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020 PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG 2020 | 39 |
| 4.1 | Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 | 39 |
| 4.2 | Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 45 |
| BAB V | PENUTUP | 47 |

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023 dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bandung Periode 2018-2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 memuat rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra BPPD Periode 2018–2023 serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif dalam Rancangan RKPD Tahun 2020. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan wujud dari sebuah perencanaan sehingga menciptakan sebuah komitmen yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah eksistensi dalam meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan pendanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target-target pembangunan daerah, sehingga diperlukan adanya penajaman penanganan pada institusi pendapatan yang menyangkut peningkatan pelayanan, kualifikasi SDM, standarisasi sarana kerja,

penguatan tata laksana dan akuntabilitas manajemen pendapatan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Serta mulai mempertajam pemanfaatan teknologi informasi, yang makin erat dengan tata kelola penerimaan dan pencatatan pendapatan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung harus berlandaskan hukum atau aturan yang telah diterbitkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait perencanaan pembangunan.

Proses penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
 - 14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;
 - 15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);
 - 16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
 - 17) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
 - 18) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);

- 19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
- 20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,).
- 22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- 23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.
- 24) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
- 25) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 609 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pemungutan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
- 26) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis dalam lima tahun (Renstra) dan rencana kerja setiap satu tahun sekali (Renja).
- 2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kota Bandung

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 disusun sesuai dengan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Memuat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta susunan garis besar isi.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2018 dan capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2018 dan perkiraan capaian tahun berjalan/ tahun 2019
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

- Berisi kajian terhadap capaian kinerja Badan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Badan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu–isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
 - 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, telaahan terhadap rancangan awal RKPD
 - 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
Menjelaskan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD

BAB IV : PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu (2018) dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Badan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung adalah menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pengelolaan pajak, retribusi dan pendapatan daerah.

Tahun 2018 Program kegiatan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung meliputi 7 (tujuh) program yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
5. Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah;
6. Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah;
7. Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah.

Realisasi program kegiatan di tahun 2018 akan dianalisis sebagai berikut:

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung**

| NO | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTPUT) (OUTPUT) | TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR PERIODE RENSTRA TAHUN 2018) | REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018 | TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 2018 | | | TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA BPPD 2019) | REALISASI CAPAIAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA BPPD TAHUN 2018 | |
|----|---|---|--|--|---|---|-----------------------------|---|---|---------|
| | | | | | TARGET RENJA BPPD 2018 | REALISASI RENJA BPPD 2018 | TINGKAT REALISASI (%) | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8-7/6 | 9 | 10 | 11=10/4 |
| 1 | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah pendapatan Pajak Daerah | 2,429,000,000,000 | 2,429,000,000,000 | 2,644,000,000,000 | 2,160,181,714,001 | 81,70 | 2,436,311,729,998 | 2,429,000,000,000 | - |
| 1 | Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah | Jumlah aplikasi pengembangan visualisasi pengelolaan data dan potensi pajak daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah aplikasi penetapan target pajak daerah Jumlah aplikasi perhitungan potensi Pajak Daerah | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1 Aplikasi 3 Dokumen | 0 aplikasi 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen | 33,3 | 4 Laporan | 12 Dokumen | 100 |
| 2 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan PAT | Jumlah dokumen kajian pajak Reklame/ PAT | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| 3 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan | 30 kegiatan opdu dan 2 dokumen | 30 kegiatan opdu dan 2 dokumen | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 30 kegiatan opdu dan 2 dokumen | 100 |
| 4 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan Pj | Jumlah Laporan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak BPHTB dan Pj | 28 dokumen | 28 dokumen | 1 dokumen | 1 Dokumen | 100 | 4 laporan | 28 dokumen | 100 |
| 5 | Penyusunan Peraturan Pertandang undangan tentang Pajak Daerah | Jumlah Kaperwal/Rakerwal/Raperda | 9 dokumen | 9 dokumen | 1 Raperwal | 0 Raperwal | - | 1 Dokumen | 9 dokumen | 100 |
| | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | - | - | - | - | - | 4 laporan | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|--|-------|--|--|-----|
| | Kegiatan Intensifikasi dan Eksistensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran | Jumlah laporan intensifikasi dan ekistensi Pajak Hotel dan Pajak restoran | - | - | - | - | - | 2.436.311.729,998 | - | - |
| II | Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah | Jumlah pendapatan pajak daerah | 2.429.000.000,000 | 2.429.000.000,000 | 2.644.000.000,000 | 2.160.181.714,001 | - | 75 % | 2.429.000.000,000 | - |
| 6 | Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah | Jumlah iklan layanan masyarakat mengenai pajak daerah melalui media surat kabar Jumlah iklan layanan masyarakat mengenai pajak daerah melalui media radio Jumlah iklan layanan masyarakat mengenai pajak daerah melalui media Televisi Jumlah iklan layanan masyarakat mengenai pajak daerah melalui sosialisasi tatap muka | 28 Tayang/Spot 660 Tayang/Spot 432 Tayang/Spot | 28 Tayang/Spot 660 Tayang/Spot 432 Tayang/Spot | 28 Tayang/Spot 660 Tayang/Spot 432 Tayang/Spot | 28 Tayang/Spot 660 Tayang/Spot 432 Tayang/Spot | 100 | Surat kabar 23 tayang , Radio lokal 6 tayang, Televisi lokal 6 tayang, website 22 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali | 660 Tayang/Spot 432 Tayang/Spot | 100 |
| 7 | Pembinaan Wajib Pajak Daerah | jumlah pelayanan penggunaan dan pembinaan wajib pajak daerah di media cetak | 100% 9 Kali | 100% 9 Kali | 20 kali 9 Kali | 20 kali 9 Kali | 100 | 12 Laporan 12 Laporan | 100% 9 Kali | 100 |
| 8 | Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak | Jumlah Penindakan Terhadap Penunggak Pajak | 100% | 100% | 12 kali | 31 kali | 258,3 | - | 100% | 100 |
| | Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah | Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak | - | - | - | - | - | 12 Laporan | - | - |
| | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pemeriksaan | - | - | - | - | - | 12 Laporan | - | - |
| III | Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan pajak daerah | 88 | 88 | 86 | 89,3 Nilai | - | 88,31 | 88 | - |
| 9 | Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak | Jumlah dokumen survey kepuasan pelayanan pajak daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 4 Dokumen | 100 |
| 10 | Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah | Jumlah Perencanaan Aplikasi Pajak Daerah Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah | 20 aplikasi | 20 aplikasi | 3 aplikasi 16 aplikasi | 2 aplikasi 11 aplikasi | 67,71 | 12 Kali | 20 aplikasi | 100 |
| | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Utara | - | - | - | - | - | 4 Laporan | - | - |
| | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung Selatan | - | - | - | - | - | 4 Laporan | - | - |
| | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah Bandung | - | - | - | - | - | 4 Laporan | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | Bandung Barat | Barat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung timur | - | - | - | - | - | - | - | 4 Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah | - | - | - | - | - | - | - | 4 Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Program Perencanaan dan Pengembangan dan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah | - | - | - | - | - | - | - | 88,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | - | - | - | - | - | - | - | 12 Laporan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IV | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Capaian pelayanan penunjang administrasi perkantoran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 |
| 11 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Jumlah jasa bulanan komunikasi | 100% | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 100 | 12 bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 12 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah unit kendaraan yang dikelola | 100% | 100% | 155 Unit | 155 Unit | 100 | 100 | 129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 13 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jumlah jasa kebersihan kantor bulanan | 100% | 100% | 10 Bulan | 10 Bulan | 100 | 100 | 12 Bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 14 | Penyediaan alat tulis kantor | Jumlah penyediaan ATK kantor | 100% | 100% | 19 Paket | 19 Paket | 100 | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 15 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Jumlah jenis cetakan dan penggandaan | 100% | 100% | 56 jenis | 56 jenis | 100 | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 16 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan | 100% | 100% | 21 jenis | 21 jenis | 100 | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 17 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kantor | 100% | 100% | 423 Unit | 411 Unit | 100 | 100 | 12 laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 18 | Penyediaan peralatan rumah tangga | Jumlah jenis peralatan rumah tangga | 100% | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 100 | 12 laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 19 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah jenis bahan bacaan | 100% | 100% | 22 jenis | 88 jenis | 100 | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 20 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor | 100% | 100% | 7 jenis | 28 jenis | 100 | 100 | 12 laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 21 | Penyediaan makanan dan minuman | Jumlah laporan penyediaan makanan dan minuman bulanan | 100% | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 22 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | 100% | 100% | 12 laporan | 12 laporan | 100 | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 23 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | Jumlah jasa pengamanan kantor | 100% | 100% | 9 Bulan | 9 Bulan | 100 | 100 | 12 Bulan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---------------------|---------------------|--|------|--|------|------------|------|------|------|------|
| V | Program Peningkatan Sarana dan Peralatan Aparatur | Capaian peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Pengadaan mebelkur | Jumlah Mebelkur Rak besi Jumlah Mebelkur lemari Jumlah Mebelkur kursi Jumlah mebelkur kursi Jumlah mebelkur meja | 100% | 100% | 20 Unit 25 m2 79 Buah 5 M2 35 M2 | 100% | 20 Unit 25 m2 79 Buah 5 M2 35 M2 | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100 | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor | Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 100% | 100% | 1 Unit | 100% | 1 Unit | 100 | 9 Laporan | 100% | 100% | 100 | |
| 26 | Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara | 100% | 100% | 222 Unit | 100% | 222 Unit | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100 | |
| 27 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebelkur | Jumlah Mebelkur terpelihara | 100% | 100% | 84 Unit | 100% | 84 Unit | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100 | |
| 28 | Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor | jumlah unit rehabilitasi sedang/berat gedung kantor | 7 gedung dan 3 unit | 7 gedung dan 3 unit | 3 Unit | 100% | 3 Unit | 100 | | - | - | | |
| V1 | Program peningkatan disiplin aparatur | Capaian peningkatan disiplin aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | | |
| 29 | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 18 Dokumen | 18 Dokumen | 975 Stel | 100% | 975 Stel | 100 | 631 Stel | - | - | | |
| VII | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% | 100% | 100% | | |
| 30 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 100% | 1 kali | 100% | 1 kali | 100 | 1 Kali | 100% | 100% | 100 | |
| 31 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 100% | 100% | 8 kali | 100% | 8 kali | 100 | 12 Laporan | 100% | 100% | 100 | |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja sesuai dengan Reviu Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2018 yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun 2018, seperti yang tercantum dalam tabel Realisasi Indikator Kinerja di bawah ini :

Tabel 2.2
Capaian indikator Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

| NO | Indikator | SPM | IKK | Target Renstra SKPD | | | | | Realisasi Capaian | | | Proyeksi | |
|----|---|-----|-----|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| | | | | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | | |
| 1 | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | Persentase meningkatkan Wajib Pajak yang membayar pajak daerah | | | 2,186,416,770,000 | 2,400,097,139,060 | 2,426,000,000 | 2,436,311,729,898 | 2,174,863,780,863 | 2,160,181,714,001 | 2,522,552,659,693 | 2,691,062,135,340 | | |
| 2 | Tercapainya kegiatan koordinasi, konfirmasi, dan rekonsiliasi pengelolaan pendapatan asli daerah bukan pajak daerah | | | 84 | 70 | 86 | 88,31 | 84,42 | | - | - | | |
| 3 | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pajak Daerah | | | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - | - | | |
| 4 | Nilai evaluasi AKIP BPPD oleh Kemenpan RB / Inspektorat. | | | 82 | 85 | 88 | 88,31 | 87,98 | | - | - | | |
| 5 | | | | 75 | 74 | 85 | - | 71,93 | | - | - | | |

2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pajak Daerah oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang Pajak Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dengan dilandasi oleh isu penting penyelenggaraan tugas dalam sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, hal tersebut merupakan suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dihadapkan pada beberapa permasalahan, yaitu :

1. Kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di Kota Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha di Kota Bandung terkait aturan yang menjadikan mereka sebagai wajib pajak;

3. Belum lancarnya konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak antara wajib pajak dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya pelayanan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, terdapat faktor-faktor penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Faktor Penghambat:

INTERNAL

1. Kualitas dan penempatan SDM
 - Belum optimalnya SDM yang terlatih, khususnya dalam bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
2. Sarana dan prasarana
 - Belum semua kantor UPT memiliki tempat yang strategis dan terjangkau oleh masyarakat yang menyebabkan tidak optimalnya fungsi pelayanan;
3. Pengelolaan piutang pajak daerah belum optimal;
4. Regulasi yang lambat dalam mengantisipasi untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada/terkini;

EKSTERNAL

1. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah masih kurang;
2. Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal;

3. Penetapan target pajak daerah masih berdasarkan pada beban kebutuhan belanja daerah, bukan berdasarkan data potensi yang ada.

Faktor Pendorong

INTERNAL

1. Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah;
2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan jumlah petugas pajak yang memadai;
3. Telah tersedianya infrastruktur sistem informasi teknologi di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

EKSTERNAL

1. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi;
2. Minat para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Bandung;
3. Mobilitas penduduk luar Bandung untuk bekerja dan menetap untuk belajar di Kota Bandung tetap tinggi;

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

TABEL 2.4

REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

| NO. | RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN TAHUN 2020 | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|-------------------------------------|--------|------------------------|----------------|---|-------------------------------------|------------------------|----------------|----|-----------------|
| | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| I | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah | BPPD | 2,522,552,659,693 | 5,759,443,080 | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah | 2,522,552,659,693 | 5,759,443,080 | | |
| 1 | Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah | BPPD | 4 Laporan | 100,000,000 | Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah | 4 Laporan | 100,000,000 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|-----------|---------------|---|--|-----------|---------------|
| 2 | Kegiatan dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah | Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT | BPPD | 1 Dokumen | 437,096,330 | Kegiatan dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah | Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT | 1 Dokumen | 437,096,330 |
| 3 | Kegiatan dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan | BPPD | 2 Dokumen | 3,907,684,550 | Kegiatan dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan | 2 Dokumen | 3,907,684,550 |
| 4 | Kegiatan dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPJ | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ | BPPD | 4 laporan | 347,000,000 | Kegiatan dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPJ | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ | 4 laporan | 347,000,000 |
| 5 | Kegiatan Penyesuaian Peraturan-undangan-tentang Pajak Daerah | Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raperda | BPPD | 1 Dokumen | 232,662,200 | Kegiatan Penyesuaian Peraturan-undangan-tentang Pajak Daerah | Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raperda | 1 Dokumen | 232,662,200 |
| 6 | Kegiatan dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak | BPPD | 4 laporan | 420,000,000 | Kegiatan dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | 4 laporan | 420,000,000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|---|----------------------|--|--|---|----------------------|--|
| | | Parkir | | | | | | | | |
| 7 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran | BPPD | 4 laporan | 315,000,000 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran | 4 laporan | 315,000,000 | |
| II | Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah | Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah | BPPD | 75% | 6,046,417,500 | Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah | Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah | 75% | 6,046,417,500 | |
| 8 | Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah | Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka | BPPD | Surat kabar 25 tayang, Radio lokal 8 tayang, Televisi lokal 8 tayang, website 22 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali | 3,312,517,500 | Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah | Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka | Surat kabar 25 tayang, Radio lokal 8 tayang, Televisi lokal 8 tayang, website 22 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali | 3,312,517,500 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------|--------------------------|----------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--|
| 9 | Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah | Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah laporan penerbitan surat teguran | BPPD | 12 Laporan 12 Laporan | 1,588,608,000 | Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah | Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah laporan penerbitan surat teguran | 12 Laporan 12 Laporan | 1,588,608,000 | |
| 10 | Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah | Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak | BPPD | 12 Laporan | 1,075,992,000 | Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah | Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak | 12 Laporan | 1,075,992,000 | |
| 11 | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pemeriksaan | BPPD | 12 Laporan | 69,300,000 | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pemeriksaan | 12 Laporan | 69,300,000 | |
| III | Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah | BPPD | 88,31 | 4,897,135,935 | Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah | 88,31 | 4,897,135,935 | |
| 12 | Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah | - Jumlah Pengembangan n/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah | BPPD | 12 Aplikasi | 3,559,358,640 | Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah | - Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah | 12 Aplikasi | 3,559,358,640 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|------|-----------|-------------|--|---|-----------|-------------|
| 13 | Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak | Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak | BPPD | 2 Dokumen | 195,000,000 | Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak | Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak | 2 Dokumen | 195,000,000 |
| 14 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara | BPPD | 4 Laporan | 147,763,505 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara | 4 Laporan | 147,763,505 |
| 15 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan | BPPD | 4 Laporan | 317,085,700 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan | 4 Laporan | 317,085,700 |
| 16 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat | BPPD | 4 Laporan | 134,858,221 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat | 4 Laporan | 134,858,221 |
| 17 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD | BPPD | 4 Laporan | 199,659,528 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah | 4 Laporan | 199,659,528 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|--------------|-----------------------|--|--|
| | Timur | wilayah bandung Timur | | | | | | Timur | bandung Timur | | | | |
| 18 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah | | 4 Laporan | 343,410,341 | | | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah | 4 Laporan | 343,410,341 | | |
| IV | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah | BPPD | 88,31 | 57,898,500 | | | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah | 88,31 | 57,898,500 | | |
| 19 | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | BPPD | 12 Laporan | 57,898,500 | | | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | 12 Laporan | 57,898,500 | | |
| V | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | BPPD | 100% | 11,550,799,150 | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 11,550,799,150 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|--|---------------|---|---|--|---------------|--|
| 20 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | BPPD | 12 bulan | 200,000,000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | 12 bulan | 200,000,000 | |
| 21 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara | BPPD | 129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan | 2,564,000,000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara | 129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan | 2,564,000,000 | |
| 22 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor | BPPD | 12 Bulan | 1,135,000,000 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 1,135,000,000 | |
| 23 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK | BPPD | 12 Laporan | 990,000,000 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK | 12 Laporan | 990,000,000 | |
| 24 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan | BPPD | 12 Laporan | 300,000,000 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan | 12 Laporan | 300,000,000 | |
| 25 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | BPPD | 12 Laporan | 165,000,000 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan | Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | 12 Laporan | 165,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|------|------------|---------------|---|---|------------|---------------|--|--|--|
| | Kantor | | | | | Kantor | | | | | | |
| 26 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | BPPD | 12 laporan | 2,500,000,000 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | 12 laporan | 2,500,000,000 | | | |
| 27 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | BPPD | 12 laporan | 150,000,000 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | 12 laporan | 150,000,000 | | | |
| 28 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | BPPD | 12 Laporan | 45,000,000 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12 Laporan | 45,000,000 | | | |
| 29 | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor | BPPD | 12 laporan | 200,000,000 | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 laporan | 200,000,000 | | | |
| 30 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan | BPPD | 12 Laporan | 1,286,799,150 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan | 12 Laporan | 1,286,799,150 | | | |
| 31 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke | Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan | BPPD | 12 Laporan | 1,500,000,000 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke | Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar | 12 Laporan | 1,500,000,000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------|-------------|----------------------|--|--|--|-------------|----------------------|--|--|
| | Luar Daerah | konsultasi keluar daerah | | | | | Luar Daerah | daerah | | | | |
| 32 | Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor | BPPD | 12 Bulan | 515,000,000 | | Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor | 12 Bulan | 515,000,000 | | |
| VI | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | BPPD | 100% | 1,470,000,000 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | 100% | 1,470,000,000 | | |
| 33 | Kegiatan Pengadaan Mebelair | Jumlah Laporan pengadaan Mebelair | BPPD | 12 Laporan | 200,000,000 | | Kegiatan Pengadaan Mebelair | Jumlah Laporan pengadaan Mebelair | 12 Laporan | 200,000,000 | | |
| 34 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BPPD | 12 Laporan | 1,000,000,000 | | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 12 Laporan | 1,000,000,000 | | |
| 35 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara | BPPD | 12 Laporan | 195,000,000 | | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara | 12 Laporan | 195,000,000 | | |
| 36 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair | Jumlah laporan Mebelair terpelihara | BPPD | 12 Laporan | 75,000,000 | | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair | Jumlah laporan Mebelair terpelihara | 12 Laporan | 75,000,000 | | |
| VII | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai | BPPD | 100% | 450,000,000 | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai | 100% | 450,000,000 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|------|------------|-----------------------|---|---|------------|-----------------------|
| 37 | Kegiatan Pengadaan Pakaiannya Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | BPPD | 661 Stel | 450,000,000 | Kegiatan Pengadaan Pakaiannya Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 661 Stel | 450,000,000 |
| VIII | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | BPPD | 100% | 1,065,000,000 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 1,065,000,000 |
| 38 | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | BPPD | 1 Kali | 115,000,000 | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Kali | 115,000,000 |
| 39 | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | BPPD | 12 Laporan | 550,000,000 | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Laporan | 550,000,000 |
| 40 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur | BPPD | 1 Kali | 400,000,000 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur | 1 Kali | 400,000,000 |
| TOTAL | | | | | 31,296,694,165 | | | | 31,296,694,165 |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung**

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | CATATAN PENTING |
|-------------------|---|---|-------------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NON URUSAN | | | | | |
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | BPPD | 100% | |
| 1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | BPPD | 12 bulan | |
| 2 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara | BPPD | 129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan | |
| 3 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor | BPPD | 12 Bulan | |
| 4 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK | BPPD | 12 Laporan | |
| 5 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan | BPPD | 12 Laporan | |
| 6 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan | BPPD | 12 Laporan | |
| 7 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | BPPD | 12 laporan | |
| 8 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | BPPD | 12 laporan | |
| 9 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | BPPD | 12 Laporan | |
| 10 | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor | BPPD | 12 laporan | |

| | | | | | |
|------------|---|---|-------------|-------------|--|
| 11 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan | BPPD | 12 Laporan | |
| 12 | Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | BPPD | 12 Laporan | |
| 13 | Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor | BPPD | 12 Bulan | |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | BPPD | 100% | |
| 14 | Kegiatan Pengadaan Mebeulair | Jumlah Laporan pengadaan Mebeulair | BPPD | 12 Laporan | |
| 15 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BPPD | 12 Laporan | |
| 16 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara | BPPD | 12 Laporan | |
| 17 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair | Jumlah laporan Mebeulair terpelihara | BPPD | 12 Laporan | |
| 18 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur | BPPD | 100% | |
| III | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | BPPD | 661 Stel | |
| 19 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | BPPD | 100% | |
| IV | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | BPPD | 1 Kali | |
| 20 | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | BPPD | 12 Laporan | |
| 21 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur | BPPD | 1 Kali | |
| V | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | BPPD | 100% | |
| 22 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | BPPD | 12 bulan | |

| URUSAN WAJIB | | | | | |
|--------------|---|--|-------------|--|--|
| V | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah | BPPD | 2,522,552,659,693 | |
| 23 | Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah | BPPD | 4 Laporan | |
| 24 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah | Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT | BPPD | 1 Dokumen | |
| 25 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan | BPPD | 2 Dokumen | |
| 26 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPJ | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ | BPPD | 4 laporan | |
| 27 | Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah | Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raperda | BPPD | 1 Dokumen | |
| 28 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | BPPD | 4 laporan | |
| 29 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran | BPPD | 4 laporan | |
| VI | Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah | Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah | BPPD | 75% | |
| 30 | Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah | Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka | BPPD | Surat kabar 25 tayang , Radio lokal 8 tayang, Televisi lokal 8 tayang, website 22 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali | |
| 31 | Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah | Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah laporan penerbitan surat teguran | BPPD | 12 Laporan 12 Laporan | |
| 32 | Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah | Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak | BPPD | 12 Laporan | |
| 33 | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pemeriksaan | BPPD | 12 Laporan | |

| | | | | | |
|-------------|--|---|-------------|--------------|--|
| VII | Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah | BPPD | 88,31 | |
| 34 | Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah | - Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah | BPPD | 12 Aplikasi | |
| 35 | Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak | Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak | BPPD | 2 Dokumen | |
| 36 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara | BPPD | 4 Laporan | |
| 37 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan | BPPD | 4 Laporan | |
| 38 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat | BPPD | 4 Laporan | |
| 38 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur | BPPD | 4 Laporan | |
| 39 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah | | 4 Laporan | |
| VIII | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah | BPPD | 88,31 | |
| 40 | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | BPPD | 12 Laporan | |

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan PD, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi BPPD Kota Bandung dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG 2020

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020

a. Tujuan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Dalam pencapaian tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung disusun dengan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Bandung sesuai dengan **Visi "TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS"** atau mewujudkan yang diartikan sebagai kota yang mempunyai jati diri, dan kebanggaan bagi seluruh warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan status. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perumusan tujuan Rencana Kerja antara lain:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi PD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi, dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Berdasarkan penjelasan visi, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah.
2. Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Daerah.

b. Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi sebagai berikut:

- a. Sasaran atas tujuan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah adalah:
 - Tercapainya target Penerimaan Pajak Daerah dengan Indikator Sasaran Jumlah pendapatan pajak daerah:
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Parkir
 5. Pajak BPHTB
 6. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 7. Pajak Reklame
 8. Pajak Air Tanah
 9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak Daerah dengan indikator sasaran: Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah.
2. Sasaran atas Tujuan Tercapainya Kepuasan Masyarakat terhadap Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan Sasarannya adalah: Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pajak Daerah dengan Indikator Sasarannya adalah
- a. SKM Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. SKM Pelayanan PAD bukan Pajak Daerah.

Tabe 3.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Tercapainya Target Penerimaan Pajak Daerah. | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah : 1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Parkir 5. Pajak BPHTB 6. PPJ 7. Pajak Reklame 8. Pajak Air Tanah 9. PBB |
| 2. | Meningkatnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Daerah. | Persentase Meningkatnya Wajib Pajak yang Membayar Pajak Daerah |
| 3. | Meningkatnya Kualitas | SKM Pelayanan Pajak Daerah |

| | |
|---|---|
| Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Pajak Daerah | SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah |
|---|---|

3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2020

Adapun target Pendapatan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2,522,552,659693.- yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak.

B A B IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020

4.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Program berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam strategi, selanjutnya dalam menetapkan program telah dipertimbangkan "siapa melakukan apa" dan jangka waktu penyelesaiannya.

Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:

- Penetapan kebijakan
- Program operasional
- Kegiatan/aktivitas

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal menuju perwujudan misi dan visi.

Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:

- Spesifik
- Terukur
- Agresif
- Berorientasi kepada hasil
- Memiliki jangka waktu tertentu

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam RPJMD 2018-2023 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-program yang akan dilaksanakan meliputi :

Program Urusan Wajib :

- (1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (2) Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah;
- (3) Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah;
- (4) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah.

Program Non Urusan :

- (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- (3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- (4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Adapun untuk merealisasikan program-program tersebut di atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kegiatan Tahun 2020
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung

| NO | PROGRAM DAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU INDIKATIF |
|----|---|--|--------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| I | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah | 2,522,552,659,693 | 5,759,443,080 |
| 1 | Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah | 4 Laporan | 100,000,000 |
| 2 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah | Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT | 1 Dokumen | 437,096,330 |
| 3 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan | 2 Dokumen | 3,907,684,550 |
| 4 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPJ | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak BPHTB dan PPJ | 4 laporan | 347,000,000 |
| 5 | Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah | Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raperda | 1 Dokumen | 232,662,200 |
| 6 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | 4 laporan | 420,000,000 |
| 7 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran | 4 laporan | 315,000,000 |

| | | | | |
|------------|--|--|--|----------------------|
| II | Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah | Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah | 75% | 6,046,417,500 |
| 8 | Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah | Jumlah Penyuluhan dan Penyampaian Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka | Surat kabar 25 tayang , Radio lokal 8 tayang, Televisi lokal 8 tayang, website 22 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali | 3,312,517,500 |
| 9 | Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah | Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah laporan penerbitan surat teguran | 12 Laporan 12 Laporan | 1,588,608,000 |
| 10 | Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah | Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak | 12 Laporan | 1,075,992,000 |
| 11 | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pemeriksaan | 12 Laporan | 69,300,000 |
| III | Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah | 88,31 | 4,897,135,935 |
| 12 | Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah | - Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah | 12 Aplikasi | 3,559,358,640 |
| 13 | Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak | Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak | 2 Dokumen | 195,000,000 |
| 14 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara | 4 Laporan | 147,763,505 |
| 15 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Selatan | 4 Laporan | 317,085,700 |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|-----------------------|
| 16 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat | 4 Laporan | 134,858,221 |
| 17 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur | 4 Laporan | 199,659,528 |
| 18 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah | 4 Laporan | 343,410,341 |
| IV | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah | 88,31 | 57,898,500 |
| 19 | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | 12 Laporan | 57,898,500 |
| V | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | 100% | 11,550,799,150 |
| 20 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | 12 bulan | 200,000,000 |
| 21 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan kendaraan dinas/operasional terpelihara | 129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan | 2,564,000,000 |
| 22 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 Bulan | 1,135,000,000 |
| 23 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK | 12 Laporan | 990,000,000 |
| 24 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan | 12 Laporan | 300,000,000 |
| 25 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan | 12 Laporan | 165,000,000 |

| | | | | |
|------------|---|---|-------------|----------------------|
| 26 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | 12 laporan | 2,500,000,000 |
| 27 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | 12 laporan | 150,000,000 |
| 28 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | 12 Laporan | 45,000,000 |
| 29 | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor | 12 laporan | 200,000,000 |
| 30 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan | 12 Laporan | 1,286,799,150 |
| 31 | Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 Laporan | 1,500,000,000 |
| 32 | Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor | 12 Bulan | 515,000,000 |
| VI | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | 100% | 1,470,000,000 |
| 33 | Kegiatan Pengadaan Mebeulair | Jumlah Laporan pengadaan Mebeulair | 12 Laporan | 200,000,000 |
| 34 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 12 Laporan | 1,000,000,000 |
| 35 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara | 12 Laporan | 195,000,000 |
| 36 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair | Jumlah laporan Mebeulair terpelihara | 12 Laporan | 75,000,000 |
| VII | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur | 100% | 450,000,000 |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------------|-----------------------|
| 37 | Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya | 661 Stel | 450,000,000 |
| VIII | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | 100% | 1,065,000,000 |
| 38 | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1 Kali | 115,000,000 |
| 39 | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 12 Laporan | 550,000,000 |
| 40 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur | 1 Kali | 400,000,000 |
| TOTAL | | | | 31,296,694,165 |

4.2 Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rencana Kerja Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2020 sebagai acuan bagi Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi Perangkat Daerah pelaksana program/kegiatan, Rencana Kerja Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kerangka anggaran Tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2020 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahun 2020 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar Perangkat Daerah, Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kota maupun Perangkat Daerah dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

B A B V

P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2020 merupakan penjabaran proses perencanaan kegiatan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dimana proses perencanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Badan mempunyai 2 (dua) Sasaran yaitu : Jumlah Pendapatan Pajak Daerah dan SKM Pelayanan Pajak Daerah.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dilingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kota Bandung yang tertuang dalam Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung 2018-2023.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung merupakan bagian dari rencana aksi dan tindak lanjut dari isu-isu atau permasalahan yang terjadi, yaitu;

1. Kesesuaian regulasi pajak daerah dengan kondisi pelaku usaha di Kota Bandung yang terus berkembang secara dimanis, khususnya untuk Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah;
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat/pelaku usaha di Kota Bandung terkait aturan yang menjadikan mereka sebagai wajib pajak;
3. Belum lancarnya konektivitas sistem yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pajak antara wajib pajak dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, dalam hal ini berkaitan dengan manajemen sistem informasi pelayanan pajak daerah, khususnya pelayanan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).

4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk meminimalis permasalahan yang dihadapi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung akan merealisasikan program-program kegiatan yang mendukung perbaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan melaksanakan kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah, Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah dan Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah

Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) program, 40 (empat puluh) kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 4.1 dengan perencanaan target pendapatan sebesar Rp. 2.522.552.659.693,- sebagaimana terlampir pada point 3.2.

Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT meridhoinya sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana yang diharapkan. Amin

KEPALA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG



Ir. H. ARIF PRASETYA S, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600825 199011 1 001

Tabel 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD PADA RKPd PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KOTA BANDUNG

| KODE | URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN | RENCANA TAHUN 2020 | | | | CATATAN PENTING | PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021 | |
|---------------------|---|---|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| URUSAN WAJIB | | | | | | | | | |
| 1 | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Pendapatan Pajak Daerah | BPPD | 2,522,552,659,693 | 5,759,443,080 | APBD | | 2,691,062,135,340 | 8,662,286,713 |
| 1 | Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Potensi Pajak Daerah | BPPD | 4 Laporan | 100,000,000 | APBD | | 4 Laporan | 120,000,000 |
| 2 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah | Jumlah dokumen kajian Pajak Reklame / PAT | BPPD | 1 Dokumen | 437,096,330 | APBD | | 1 Dokumen | 480,805,963 |
| 3 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | Jumlah dokumen kajian Pajak Bumi dan Bangunan | BPPD | 2 Dokumen | 3,907,684,550 | APBD | | 2 Dokumen | 6,781,724,550 |
| 4 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak BPHTB dan PPh | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak | BPPD | 4 laporan | 347,000,000 | APBD | | 4 laporan | 382,000,000 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|---|----------------------|-------------|---|----------------------|
| | | BPH/TPB dan PPT | | | | | | |
| 5 | Kegiatan Penyesuaian Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah | Jumlah Raperwal/ Rakepwal/ Raperda | BPPD | 1 Dokumen | 232,662,200 | APBD | 1 Dokumen | 117,756,200 |
| 6 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hiburan dan Pajak Parkir | BPPD | 4 laporan | 420,000,000 | APBD | 4 laporan | 440,000,000 |
| 7 | Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran | Jumlah laporan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Hotel dan Pajak restoran | BPPD | 4 laporan | 315,000,000 | APBD | 4 laporan | 340,000,000 |
| II | Program Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Pajak Daerah | Persentase Kepatuhan Wajib Pajak Daerah | BPPD | 75% | 6,046,417,500 | APBD | 75% | 6,460,564,650 |
| 8 | Kegiatan Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah | Jumlah Penyuluhan dan Penyempaian Informasi Pajak Daerah melalui surat kabar, radio, televisi, website, dan sosialisasi tatap muka | BPPD | Surat kabar 25 tayang, Radio lokal 8 tayang, Televisi lokal 8 tayang, website 22 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali | 3,312,517,500 | APBD | Surat kabar 30 tayang, Radio lokal 9 tayang, Televisi lokal 9 tayang, website 30 paket, dan Sosialisasi tatap muka 9 kali | 3,643,769,250 |
| 9 | Kegiatan Pembinaan Wajib Pajak Daerah | Jumlah laporan Pelayanan Pengaduan Jumlah laporan penerbitan surat | BPPD | 12 Laporan 12 Laporan | 1,588,608,000 | APBD | 12 Laporan 12 Laporan | 1,668,038,400 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---|-------------|--------------|----------------------|------|--|--------------|----------------------|--|
| | | teguran | | | | | | | | |
| 10 | Kegiatan Penindakan Penunggak Pajak Daerah | Jumlah laporan Penindakan Penunggak Pajak | BPPD | 12 Laporan | 1,075,992,000 | APBD | | 12 Laporan | 1,075,992,000 | |
| 11 | Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pemeriksaan | BPPD | 12 Laporan | 69,300,000 | APBD | | 12 Laporan | 72,765,000 | |
| III | Program Perencanaan dan Penyelenggaraan Pelayanan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan Pajak Daerah | BPPD | 88,31 | 4,897,135,935 | | | 88,31 | 5,224,442,227 | |
| 12 | Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah | - Jumlah Pengembangan/ Pemeliharaan Aplikasi Pelayanan Pajak Daerah | BPPD | 12 Aplikasi | 3,559,358,640 | | | 12 Aplikasi | 3,759,358,640 | |
| 13 | Kegiatan Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah atau Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak | Jumlah Dokumen Survei Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Pajak | BPPD | 2 Dokumen | 195,000,000 | | | 2 Dokumen | 215,000,000 | |
| 14 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Utara | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Utara | BPPD | 4 Laporan | 147,763,505 | | | 4 Laporan | 159,072,485 | |
| 15 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Selatan | Jumlah Laporan kegiatan operasional | BPPD | 4 Laporan | 317,085,700 | | | 4 Laporan | 396,357,125 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--|--------------|-----------------------|--|
| | | pelayanan PAD wilayah bandung Selatan | | | | | | | | |
| 16 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Barat | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Barat | BPPD | 4 Laporan | 134,858,221 | | | 4 Laporan | 141,601,132 | |
| 17 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Timur | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung Timur | BPPD | 4 Laporan | 199,659,528 | | | 4 Laporan | 209,642,504 | |
| 18 | Kegiatan Operasional Pelayanan PAD Wilayah Bandung Tengah | Jumlah Laporan kegiatan operasional pelayanan PAD wilayah bandung tengah | | 4 Laporan | 343,410,341 | | | 4 Laporan | 343,410,341 | |
| IV | Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Nilai SKM Pelayanan PAD Bukan Pajak Daerah | BPPD | 88,31 | 57,898,500 | | | 88,31 | 63,688,350 | |
| 19 | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PAD Bukan Pajak Daerah | BPPD | 12 Laporan | 57,898,500 | | | 12 Laporan | 63,688,350 | |
| NON URUSAN | | | | | | | | | | |
| V | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran | BPPD | 100% | 11,550,799,150 | APBD | | 100% | 12,224,539,108 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--|---------------|------|--|---------------|
| 20 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | BPPD | 12 bulan | 200,000,000 | APBD | 12 bulan | 210,000,000 |
| 21 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan-kendaraan dinas/operasional terpelihara | BPPD | 129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan | 2,564,000,000 | APBD | 129 Unit roda dua; 26 unit roda 4; 3 bis pelayanan | 2,820,400,000 |
| 22 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah jasa bulanan penyediaan jasa kebersihan kantor | BPPD | 12 Bulan | 1,135,000,000 | APBD | 12 Bulan | 1,248,500,000 |
| 23 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah laporan bulanan penyediaan ATK | BPPD | 12 Laporan | 990,000,000 | APBD | 12 Laporan | 990,000,000 |
| 24 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah laporan pengadaan cetakan dan penggandaan | BPPD | 12 Laporan | 300,000,000 | APBD | 12 Laporan | 300,000,000 |
| 25 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Laporan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan | BPPD | 12 Laporan | 165,000,000 | APBD | 12 Laporan | 173,250,000 |
| 26 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | BPPD | 12 laporan | 2,500,000,000 | APBD | 12 laporan | 2,500,000,000 |
| 27 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga | BPPD | 12 laporan | 150,000,000 | APBD | 12 laporan | 157,500,000 |
| 28 | Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan | BPPD | 12 Laporan | 45,000,000 | APBD | 12 Laporan | 47,250,000 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|-------------|----------------------|
| | | perundang undangan | | | | | | | |
| 29 | Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor | BPPD | 12 laporan | 200,000,000 | APBD | | 12 laporan | 210,000,000 |
| 30 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah laporan kegiatan penyediaan makanan dan minuman bulanan | BPPD | 12 Laporan | 1,286,799,150 | APBD | | 12 Laporan | 1,351,139,107.50 |
| 31 | Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah | BPPD | 12 Laporan | 1,500,000,000 | APBD | | 12 Laporan | 1,650,000,000 |
| 32 | Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor | Jumlah jasa bulanan pengamanan kantor | BPPD | 12 Bulan | 515,000,000 | APBD | | 12 Bulan | 566,500,000 |
| VI | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik | BPPD | 100% | 1,470,000,000 | APBD | | 100% | 1,570,000,000 |
| 33 | Kegiatan Pengadaan Mebelair | Jumlah Laporan pengadaan Mebelair | BPPD | 12 Laporan | 200,000,000 | APBD | | 12 Laporan | 200,000,000 |
| 34 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah laporan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | BPPD | 12 Laporan | 1,000,000,000 | APBD | | 12 Laporan | 1,100,000,000 |
| 35 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah laporan Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara | BPPD | 12 Laporan | 195,000,000 | APBD | | 12 Laporan | 195,000,000 |

| | | | | | | | | |
|-------------|---|---|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 36 | Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair | Jumlah laporan Mebeulair terpelihara | BPPD | 12 Laporan | 75,000,000 | APBD | 12 Laporan | 75,000,000 |
| VII | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat Disiplin Aparatur | BPPD | 100% | 450,000,000 | APBD | 100% | 495,000,000 |
| 37 | Kegiatan Pengadaan Pakaiannya Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaiannya beserta perlengkapannya | BPPD | 661 Stel | 450,000,000 | APBD | 661 Stel | 495,000,000 |
| VIII | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya | BPPD | 100% | 1,065,000,000 | APBD | 100% | 1,118,250,000 |
| 38 | Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | BPPD | 1 Kali | 115,000,000 | APBD | 1 Kali | 120,750,000 |
| 39 | Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah laporan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | BPPD | 12 Laporan | 550,000,000 | APBD | 12 Laporan | 577,500,000 |
| 40 | Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur | Jumlah penyelenggaraan Pembinaan Kinerja Aparatur | BPPD | 1 Kali | 400,000,000 | APBD | 1 Kali | 420,000,000 |
| | | TOTAL | | | 31,296,694,165 | | | 35,818,771,048 |